

Dimensi-Dimensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Amalia Ramadani¹, Khairunnisaa Raya Fajrin², Nurul Alifiah Aslam³, Zaenul Slam⁴.

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Intansi: Jl. Raya Bojongsari No.55, Bojongsari Baru, kec Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16516

Email: nurulalifiahaslam9@gmail.com

Abstract

Pancasila as a state ideology plays a fundamental role in shaping national identity and the direction of Indonesian development. However, in the era of globalization and digitalization, there is a gap between the ideal values of Pancasila and social reality, characterized by inequality, moral degradation, and a weakening of the younger generation's understanding of national values. The problem of this research focuses on how the dimensions of reality, idealism, and flexibility of Pancasila can be understood and re-actualized so that it remains relevant in national life. This research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. Data were obtained from books, scientific journals, and official documents, then analyzed using content analysis techniques with source triangulation to ensure consistency and depth of data. The results of the study indicate that: (1) the reality dimension confirms Pancasila as a source of law and guidelines for the practice of national life, although its implementation is not yet fully optimal; (2) the idealism dimension contains the nation's noble ideals towards a just, democratic, and prosperous society; and (3) the flexibility dimension shows that Pancasila is adaptive to developments over time without losing its basic values. Theoretically, this research affirms Pancasila as an open, integrative, and dynamic ideology, and offers practical implications for strengthening character education and public policy based on national values.

Keywords: Pancasila, state ideology, reality, idealism, flexibility.

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran fundamental dalam membentuk identitas nasional dan arah pembangunan Indonesia. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi, terjadi kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan realitas sosial yang ditandai oleh ketimpangan, degradasi moral, serta melemahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai kebangsaan. Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas Pancasila dapat dipahami serta diaktualisasikan kembali agar tetap relevan dalam kehidupan nasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan kedalaman data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dimensi realitas menegaskan Pancasila sebagai sumber hukum dan pedoman praktik kehidupan berbangsa, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal; (2) dimensi idealisme memuat cita-cita luhur bangsa menuju masyarakat adil, demokratis, dan sejahtera; dan (3) dimensi fleksibilitas menunjukkan bahwa Pancasila bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang integratif dan dinamis, serta memberikan implikasi praktis bagi penguatan pendidikan karakter dan kebijakan publik berbasis nilai-nilai kebangsaan.

Kata kunci: Pancasila, ideologi negara, realitas, idealisme, fleksibilitas.

PENDAHULUAN

Setiap negara memerlukan ideologi atau aturan dasar agar dapat berjalan dengan lancar, karena ideologi berfungsi sebagai fondasi, gagasan, atau panduan yang membuat negara maju dan sukses. Nilai-nilai

suatu negara harus memiliki fondasi yang kuat, karena presiden tidak dapat membuat masyarakat bahagia hanya dengan mengandalkan fantasi dan keinginannya sendiri. Ideologi resmi di Indonesia disebut Pancasila, dan ini berlaku secara luas, tidak

dibuat khusus untuk wilayah tertentu. Namun, jika ada perbedaan pendapat tentang fondasi negara, terkadang hal ini dapat menimbulkan perselisihan (Hakim et al., 2023).

Dalam sejarahnya, status Pancasila sebagai ideologi bangsa telah mengalami fluktuasi, baik dalam pemahaman maupun praktik masyarakat. Pasca-kejatuhan orde baru, Pancasila tampaknya lenyap dari diskusi sejarah yang dianggap tidak lagi penting selama masa reformasi. Orang-orang makin jarang menyebut, mengutip, atau mendiskusikan Pancasila, baik dalam urusan pemerintahan, isu nasional, maupun kehidupan sehari-hari. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia hampir melupakan identitas sejati mereka, yang pada dasarnya adalah Pancasila (Essla et al., 2023).

Indonesia menganut ideologi Pancasila sebagai landasan dasarnya. Setiap prinsip dalam Pancasila mencerminkan tujuan, nilai, dan aspirasi bangsa Indonesia. Secara mendasar, Pancasila berfungsi sebagai landasan sistem negara dan mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsipnya. Pancasila terdiri atas lima nilai fundamental yang telah tumbuh sejak masa lampau dan terus berkembang seiring dengan kemajuan bangsa Indonesia. Sejarah sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Setiap tindakan manusia di masa lalu

memberikan pengaruh terhadap masa depan yang berbeda, karena peristiwa-peristiwa masa lampau selalu berhubungan dengan keadaan sekarang dan menjadi landasan bagi arah masa depan (Sitanggang, 2024).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi inti fundamental ideologi nasional Indonesia, yang mengarahkan perilaku masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Lima prinsip Pancasila mencerminkan pandangan dunia yang berakar pada nilai-nilai keyakinan kepada Tuhan, penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman etis bagi bangsa dalam membangun struktur sosial yang adil dan beradab. Di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, penerapan nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai kekuatan pemersatu yang mampu menyatukan kepentingan individu dan kolektif. Namun, di era globalisasi yang dipenuhi tantangan ideologis, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila tidak boleh sekadar simbolis, melainkan harus diwujudkan secara konkret melalui tindakan praktis dan kebijakan sosial. Oleh karena itu, pendidikan dan pembentukan karakter muncul sebagai alat vital untuk menanamkan nilai-nilai ideologis Pancasila pada generasi muda, memastikan mereka tidak terbawa arus globalisasi dan pengaruh budaya asing (Sucipto & Najicha, 2024).

Dalam realitas kehidupan nasional saat ini, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diamati melalui dimensi-dimensi ideologinya, yaitu dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Dimensi realitas Pancasila terlihat dalam upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan keadilan bagi seluruh warganya, meskipun masih dihadapkan pada masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan intoleransi. Dimensi idealisme tercermin dalam aspirasi mulia bangsa untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Namun, pada masa kini, cita-cita tersebut sering bertabrakan dengan hambatan seperti globalisasi, praktik korupsi, dan kemerosotan moral di kalangan generasi muda. Di sisi lain, dimensi fleksibilitas menunjukkan bahwa Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas nasional. Oleh karena itu, dimensi-dimensi Pancasila perlu dihidupkan kembali melalui kebijakan pemerintah dan pendidikan karakter agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat kontemporer (Marzuki et al., 2025).

Dalam konteks perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta derasnya arus informasi, pergeseran nilai moral, dan meningkatnya individualisme mengharuskan bangsa Indonesia memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari. Generasi muda khususnya, perlu dibekali dengan kesadaran kritis terhadap pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup di tengah perubahan sosial yang begitu cepat. Proses pendidikan Pancasila menjadi langkah strategis untuk membangun karakter bangsa yang berkepribadian kuat, berintegritas, dan terbuka terhadap kemajuan global tanpa kehilangan identitas nasional. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipandang sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai ideologi yang hidup dan mampu menjawab tantangan masa kini (Rarezzi et al., 2025).

Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, penerapan dimensi realitas dan idealisme Pancasila menjadi tantangan tersendiri. Dimensi realitas menuntut agar nilai-nilai Pancasila diwujudkan secara konkret dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun, praktiknya sering kali masih ditemukan kesenjangan antara cita-cita ideal dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan moral dan komitmen kebangsaan bagi para pemangku kebijakan agar nilai-nilai dasar Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam tindakan politik dan ekonomi bangsa (Aditya, 2024).

Sementara itu, dimensi fleksibilitas Pancasila menjadi kunci agar ideologi ini tetap relevan dalam menghadapi perubahan

global yang cepat. Pancasila harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan sosial tanpa kehilangan makna aslinya sebagai dasar kehidupan berbangsa dan benegara. Di era digital ini, nilai-nilai pancasila perlu diinternalisasikan melalui pendidikan karakter, media sosial, dan budaya populer yang mampu menjangkau generasi muda. Dengan demikian, pancasila dapat terus menjadi pedoman moral dan etika publik dalam setiap aspek kehidupan masyarakat modern. Sebagai ideologi negara, pancasila memiliki peran fundamental dalam menjaga keutuhan, stabilitas, dan arah pembangunan bangsa Indonesia. Ideologi ini menjadi sumber nilai yang menuntun bangsa dalam menentukan kebijakan, bersikap, dan bertindak sesuai dengan jati diri nasional. Di tengah arus globalisasi yang membawa pengaruh budaya dan ideologi yang asing, pancasila berfungsi sebagai filter dan pedoman moral agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitasnya. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan pengamalan pancasila di seluruh lapisan masyarakat perlu terus dilakukan melalui pendidikan, media, dan kebijakan nasional yang konsisten (Wafiy et al., 2024).

Dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa saat ini seperti degradasi moral, konflik sosial, dan pengaruh ideologi asing, keberadaan pancasila menjadi semakin penting untuk dijadikan pedoman bersama.

Nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan kebangsaan, terutama dalam memperkuat solidaritas sosial dan memperkokoh rasa persatuan. Upaya aktualisasi nilai-nilai pancasila tidak hanya melalui regulasi formal, tetapi juga melalui keteladanan pemimpin, pendidikan karakter, dan budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pancasila, diharapkan setiap individu mampu menjadikan nilai-nilai luhur tersebut sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari (Rudiawan, 2021). Pendidikan memainkan peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda sebagai upaya menjaga keberlanjutan ideologi bangsa. Melalui kurikulum yang berorientasi pada penguatan karakter, peserta didik diharapkan mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lingkungan sosial dan keluarga juga berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sikap toleransi, gotong royong, serta cinta tanah air (Sakinah & Dewi, 2021).

Dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang ada, penelitian ini memainkan peran krusial dalam menegaskan kembali relevansi Pancasila sebagai ideologi yang aktif dan fleksibel dalam konteks pembangunan nasional saat ini. Penelitian ini

muncul dari kebutuhan mendesak untuk memperkuat Pancasila sebagai landasan moral, sosial, dan politik yang efektif dalam menangani kemerosotan etika dan kebingungan ideologis yang saat ini melanda masyarakat Indonesia. Dengan bantuan studi teoretis dan tinjauan literatur, penelitian ini berfokus pada inisiatif untuk memperbarui fungsi Pancasila dalam menciptakan identitas nasional yang bersatu, saling menghormati, dan kemampuan bersaing di era globalisasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan pendekatan alternatif dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila melalui dunia pendidikan, peraturan negara, dan contoh perilaku masyarakat, sehingga nilai-nilai ini dapat sepenuhnya tertanam dalam rutinitas sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan aplikasi praktis untuk memperkuat Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional yang adil, bermartabat, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia (Hakim et al., 2023)

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasi makna dimensi-dimensi Pancasila sebagai ideologi negara, termasuk dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada penguraian nilai-nilai normatif dan konseptual daripada pengukuran kuantitatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah

penelitian perpustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dengan menganalisis isi dan makna setiap sumber yang relevan. Alat penelitian yang digunakan adalah lembar pencatatan data, yang berfungsi untuk mengklasifikasikan informasi sesuai dengan tiga dimensi yang diteliti. Untuk memastikan validitas data, triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi guna memperoleh pemahaman yang konsisten dan mendalam. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis konten, bertujuan untuk mengidentifikasi makna, hubungan, dan relevansi antara konsep teoretis dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan negara.

Dimensi Realitas

Dalam konteks kehidupan nasional Indonesia saat ini, manifestasi konkret Pancasila sebagai ideologi negara tercermin dalam bagaimana nilainya telah menjadi landasan praktis bagi sistem negara, kehidupan sosial, budaya, dan kebijakan publik. Sebagai landasan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila bukan sekadar idealisme

abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk konkret dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian bahwa “Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan negara tetapi juga mencakup sumber hukum, prinsip moral, aspirasi nasional, dan pembentuk identitas nasional Indonesia.” Penelitian juga menunjukkan bahwa Pancasila telah berfungsi sebagai landasan ideologis yang mendasari identitas nasional Indonesia, dengan nilai-nilai seperti persatuan, kerja sama, demokrasi, dan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa terbukti menjadi pilar utama dalam membentuk karakter bangsa dan negara (Arifin et al., 2023).

Dalam dimensi realitas ini, tantangan muncul ketika penerapan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dihadapkan pada dinamika pluralisme, globalisasi, dan kebijakan negara yang terkadang tidak sepenuhnya selaras dengan idealisme Pancasila. Misalnya, aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat (prinsip kelima) masih dirasakan tidak merata, menjadikan hal ini sebagai titik fokus studi yang krusial. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai “sumber hukum” dan pembentuk identitas nasional yang harus diwujudkan secara konkret dalam kehidupan nasional. Namun, realisasi dimensi realitas ini belum sempurna. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan sosial mulai menghadapi tantangan dan stagnasi. Misalnya, studi menyatakan bahwa “nilai-nilai Pancasila mulai memudar dalam kehidupan saat ini” jika tidak terus diperkuat. Hal ini menjadi perhatian serius karena jika ideologi negara hanya berada pada tingkat deklarasi dan simbol, fungsi praktisnya akan melemah (Essla et al., 2023).

Penelitian literatur menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis bagi pengelolaan negara dan persatuan nasional. Dalam satu studi, disebutkan bahwa “Pancasila adalah filsafat negara yang universal dan komprehensif yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam.” Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak terbatas pada ranah pemerintahan saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial-religius dan hubungan manusia dengan lingkungan, yang diambil dari budaya dan tradisi bangsa. Oleh karena itu, realitas Pancasila dapat dilihat sebagai penerapan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk norma-norma negara, undang-undang, kebijakan, dan praktik kehidupan sehari-hari (Hakim et al., 2023).

Pancasila dalam dimensi realitasnya menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya berasal dari kondisi kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Pancasila tidak diadopsi secara spontan dari

ideologi negara lain, melainkan diambil dari nilai-nilai budaya, moral, dan sosial yang telah lama hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mewakili nilai-nilai luhur yang berasal dari pengalaman sejarah, tradisi adat, dan pandangan dunia masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini merefleksikan identitas bangsa dan berfungsi sebagai panduan bersama dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, adil, dan beradab. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat ideal dan normatif, tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam realitas sosial komunitas. Setiap prinsip dalam Pancasila bukan sekadar formulasi konseptual, melainkan kristalisasi dari praktik sosial dan budaya yang telah lama dilakukan di komunitas lokal di Indonesia. Misalnya, nilai persatuan tercermin dalam tradisi kerjasama mutual, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat dalam penghormatan terhadap orang lain melalui adat istiadat, dan nilai demokrasi melalui musyawarah adat sebagai bentuk pengambilan keputusan kolektif. Studi menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan hasil dari “mengadopsi nilai-nilai budaya asli bangsa” yang kemudian diinternalisasi ke dalam sistem negara (Muhamad et al., 2024).

Dimensi realitas Pancasila menuntut agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya dimengerti secara konseptual,

tetapi juga diterapkan melalui sikap dan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari., baik dalam hubungan antarindividu, kehidupan sosial, maupun dalam administrasi negara. Pancasila sebagai ideologi yang hidup harus diimplementasikan dalam kebijakan publik, sistem tata kelola, dan dalam sikap serta tindakan warga negara di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dimensi realitas menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar kumpulan nilai-nilai ideal, tetapi sistem nilai yang berakar pada realitas sosial, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia, menjadikannya ideologi yang dinamis, relevan, dan selalu kontekstual sepanjang waktu. Penerapan Pancasila tidak hanya tentang implementasi normatif, tetapi bagaimana masyarakat dan negara dapat mengenali, menguatkan, dan merealisasikan nilai-nilai inti tersebut dalam konteks perubahan sosial dan globalisasi. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam dimensi realitas ini membutuhkan proses pendidikan, pengkulturan, dan pengembangan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat sehingga prinsip-prinsip Pancasila tetap hidup dalam bentuk perilaku, bukan sekadar simbol (Andrias & Rumalean, 2023).

Selain itu, dalam konteks tata kelola negara dan pembangunan nasional, penegakan nilai-nilai Pancasila memerlukan integrasi sistematis melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan partisipasi

aktif warga negara. Dengan kata lain, negara tidak cukup hanya menetapkan Pancasila dalam konstitusi dan simbol-simbol formal; melainkan harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan semua elemen masyarakat berperan dalam mewujudkan nilainya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan, aparatur pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta memiliki tanggung jawab bersama untuk menginternalisasi dan mengimplementasikan Pancasila dalam praktik sehari-hari. Misalnya, kebijakan pembangunan daerah, program pengentasan kemiskinan, dan pengembangan karakter nasional seharusnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan menyelaraskan kebijakan dengan nilai-nilai inti Pancasila dapat menyebabkan ketimpangan sosial, penurunan kepercayaan publik, dan tata kelola yang lemah. Oleh karena itu, memperkuat dimensi nyata Pancasila bukan hanya tentang menerapkan nilai-nilai dalam wacana, tetapi mengokohkan budaya nasional yang memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup, bekerja, dan mengarahkan semua kegiatan nasional (Pujiati & Muhsin, 2020).

Dimensi Idealisme

Dimensi idealisme Pancasila, yang berfungsi sebagai ideologi nasional,

mencerminkan aspirasi luhur yang terintegrasi dalam lima asasnya, yaitu Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Demokrasi yang Dipimpin oleh Hati Nurani dalam Perwakilan Rakyat, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekadar target, melainkan pedoman ideal yang harus diwujudkan oleh bangsa. Seperti dijelaskan dalam sebuah artikel, Pancasila sebagai ideologi khas Indonesia dapat mengakomodasi keragaman tanpa mengabaikan nilai-nilai universal (Muhamad et al., 2024). Dimensi idealisme menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar pedoman, tetapi juga aspirasi yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam praktik kebangsaan dan kenegaraan. Dalam sebuah studi, disebutkan bahwa “ideologi Pancasila terdiri dari nilai-nilai yang menjadi aspirasi untuk dicapai sebagai cara hidup dalam administrasi negara dan kesepakatan bersama.” Dengan demikian, idealisme Pancasila memberikan arah dan motivasi bagi bangsa untuk maju menuju kehidupan nasional yang bermartabat, adil, bersatu, demokratis, dan sejahtera. Meskipun demikian, tantangan dalam mewujudkan idealisme ini muncul akibat kesenjangan antara prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan kondisi nyata di masyarakat, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, diskriminasi, konflik antar kelompok, dan politisasi nilai-

nilai agama atau etnis. Oleh karena itu, dimensi idealis Pancasila tetap relevan dan sangat penting sebagai arah panduan bagi bangsa Indonesia, namun implementasinya memerlukan upaya yang tekun dan refleksi yang berkelanjutan (Zulfikar et al., 2022).

Dimensi idealisme dalam Pancasila mencerminkan bahwa ideologi ini dipenuhi dengan aspirasi dan tujuan yang harus dicapai dalam segala aspek kehidupan sosial, nasional, dan negara. Esensi dari suatu ideologi tidak hanya untuk mencerminkan realitas yang ada di masyarakat, tetapi juga mencakup nilai-nilai ideal yang berfungsi sebagai panduan dan orientasi bagi bangsa untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi nasional tidak hanya mencerminkan realitas saat ini, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai ideal yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju aspirasi mulia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, beradab, dan berkeadilan sosial (Hasibuan & Sulistyono, 2018).

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila membawa harapan, semangat, dan keyakinan bahwa kehidupan bangsa Indonesia dapat diarahkan menuju kondisi yang lebih baik. Aspirasi-aspirasi tersebut meliputi kemakmuran, keadilan sosial, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan persatuan nasional yang kuat. Pancasila memberikan landasan moral dan arah bagi pembangunan nasional di

semua bidang seperti politik, ekonomi, urusan sosial, budaya, dan hukum, sehingga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, dimensi idealisme ini menegaskan fungsi Pancasila sebagai panduan dan motivator semangat bangsa untuk terus berjuang menuju tujuan nasional yang tercantum dalam Prakata Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mendidik bangsa, dan berpartisipasi dalam tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Lumintang et al., 2023).

Selain itu, idealisme yang terkandung dalam Pancasila bukanlah mimpi kosong yang sulit untuk diwujudkan, melainkan aspirasi realistis yang dapat dicapai melalui upaya konkret dan kesadaran kolektif seluruh warga negara Indonesia. Idealisme Pancasila memberikan arah bagi kehidupan bangsa agar tidak kehilangan kebijakan moral di tengah perkembangan zaman. Nilai-nilai Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila memberikan inspirasi dan motivasi bagi seluruh komponen bangsa untuk terus berjuang demi kehidupan yang lebih baik, beradab, dan bermartabat. Dengan demikian, dimensi idealisme dalam Pancasila menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menggambarkan kondisi masyarakat

Indonesia saat ini, tetapi juga mengandung visi dan aspirasi yang harus terus diperjuangkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan manusiawi sesuai dengan identitas bangsa Indonesia (Irawan et al., 2023).

Dimensi idealisme Pancasila tidak hanya mencakup aspirasi yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia, tetapi juga memotivasi setiap generasi untuk menjadi subjek aktif dalam perubahan sosial. Oleh karena itu, idealisme ini tidak hanya menuntut pengakuan terhadap nilai-nilai luhur, tetapi juga kemampuan untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut menjadi inovasi sosial, kebijakan kreatif, dan kemajuan budaya nasional yang progresif. Prinsip-prinsip Pancasila seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak hanya menuntut distribusi materi yang adil, tetapi juga penciptaan sistem yang meningkatkan martabat manusia, menghilangkan diskriminasi, dan memupuk hubungan yang sehat antara individu, komunitas, dan negara. Demikian pula, nilai Persatuan Indonesia berarti bahwa keragaman harus dilihat sebagai potensi, bukan hambatan sehingga dalam praktik nasional, idealisme Pancasila mendorong pengembangan karakter nasional yang inklusif yang menghormati pluralisme dan mengundang semua unsur bangsa untuk bersinergi dalam kemajuan bersama. Dengan

cara ini, idealisme Pancasila menegaskan bahwa pembangunan nasional harus diarahkan pada keseluruhan manusia—bukan hanya pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi juga pembangunan etis, budaya, dan spiritual yang mencerminkan martabat bangsa Indonesia (Abidin, 2020).

Dimensi Fleksibilitas

Dimensi fleksibilitas Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan kemampuannya untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya. Pancasila, yang lahir dari nilai-nilai budaya bangsa dan konsensus nasional, berbeda dengan ideologi yang kaku dan tertutup. Sebuah studi menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki karakteristik unik dengan “kemampuan untuk menampung keragaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal” (Muhamad et al., 2024). Kekuatan fleksibilitas ini sangat penting dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, digitalisasi, perubahan sosial dan politik, serta pluralisme yang semakin kompleks. Dalam konteks mahasiswa, fleksibilitas ini dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks baru misalnya, dalam etika digital, toleransi antaragama, dan keadilan sosial digital. Studi lain menekankan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara

memerlukan penyesuaian terhadap realitas baru agar nilai-nilai tersebut tetap relevan (Atqiya et al., 2024).

Dimensi fleksibilitas dalam Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya. Sebuah ideologi yang memiliki dimensi fleksibilitas akan terus memberikan pembaruan, memelihara, dan memperkuat relevansinya seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan Pancasila dinamis dan demokratis, karena dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Sudharmono (1995), nilai-nilai Pancasila bersifat abadi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga tetap menjadi pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia di setiap fase sejarahnya (Hasan et al., 2023).

Pancasila tidak kaku atau tertutup terhadap perkembangan dan pemikiran baru. Faktanya, nilai-nilai dasar Pancasila mengandung kekuatan dan relevansi yang dapat mengasah masyarakat untuk mengembangkan ide-ide baru yang sejalan dengan tantangan kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki dinamika internal yang kuat dan realistis, sehingga setiap generasi dapat menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sesuai

dengan konteks dan kebutuhan zaman, tanpa harus mengubah substansi atau esensi nilai-nilai dasarnya. Kekuatan fleksibilitas Pancasila juga berarti bahwa dalam penerapannya, Pancasila dapat beradaptasi dengan berbagai bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun budaya, selama perubahan-perubahan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, Pancasila tetap relevan dan berfungsi sebagai panduan bagi kehidupan bangsa dari waktu ke waktu. Keterbukaan ini tidak membuat Pancasila kehilangan arah, melainkan memperkuat posisinya sebagai ideologi negara yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu merespons tantangan zaman (Sudharmono, 1995).

Dengan sifatnya yang fleksibel, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai panduan statis, tetapi juga sebagai ideologi yang hidup, sebuah ideologi yang terus berkembang, diperkaya, dan ditafsirkan ulang oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perubahan dan dinamika kehidupan. Oleh karena itu, dimensi fleksibilitas menegaskan bahwa Pancasila bersifat dinamis dan selalu relevan sepanjang waktu, karena dapat beradaptasi dengan kemajuan peradaban manusia tanpa kehilangan arah, esensi, dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasannya (Febriyanto, 2018).

Dimensi fleksibilitas Pancasila menunjukkan bahwa ideologi negara ini tidak hanya bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi transformasi sosial dan teknologi. Fleksibilitas ini memungkinkan nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan modern tanpa kehilangan esensi dasarnya. Di era globalisasi dan revolusi digital, Pancasila berperan sebagai landasan etis bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, memastikan bahwa mereka tetap berakar pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas. Misalnya, prinsip Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat membimbing masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab; prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berfungsi sebagai panduan dalam menjaga etika digital; sementara prinsip Persatuan Indonesia berperan sebagai landasan untuk memperkuat kohesi sosial di tengah arus informasi global yang seringkali menimbulkan perpecahan.

Selain itu, fleksibilitas Pancasila terlihat jelas dalam perannya sebagai landasan untuk menyesuaikan kebijakan publik. Pemerintah dan masyarakat dapat menafsirkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual untuk menangani isu-isu baru seperti keberlanjutan lingkungan, kesetaraan gender, dan keadilan ekonomi digital. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan

sekadar simbol normatif, tetapi sistem nilai yang mampu memberikan arahan moral dalam perubahan struktural negara. Menurut penelitian, fleksibilitas Pancasila menjadikannya sebagai “ideologi negara yang tidak kaku, tetapi dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya.” Fleksibilitas Pancasila berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memastikan ideologi ini tetap relevan, kontekstual, dan operasional sepanjang setiap periode sejarah bangsa. Melampaui sekadar konsep, fleksibilitas Pancasila mewakili kebijaksanaan khas bangsa Indonesia yang menghargai perubahan tanpa menolak akar tradisi. Dalam praktiknya, hal ini terlihat jelas dalam cara nilai-nilai Pancasila terus berfungsi sebagai panduan dalam sistem demokrasi, pendidikan karakter, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan fleksibilitasnya, Pancasila berperan sebagai ideologi yang membimbing bangsa dalam menghadapi transformasi dunia modern sambil menjaga keseimbangan antara kemajuan dan moralitas. Oleh karena itu, fleksibilitas Pancasila merupakan jaminan kelangsungan ideologi negara ini dalam menjaga persatuan nasional sambil menghadapi tantangan masa depan (Gulyanto & Sukmawati, 2024).

KESIMPULAN

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran fundamental dalam

membentuk identitas, arah, dan nilai kehidupan bangsa Indonesia. Dalam konteks kehidupan nasional, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar konstitusional, tetapi juga pedoman moral dan sumber hukum yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui dimensi realitasnya, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam budaya, tradisi, dan praktik sosial masyarakat Indonesia, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial dan melemahnya penghayatan nilai. Sementara itu, dimensi idealisme Pancasila menunjukkan cita-cita luhur bangsa untuk mencapai kehidupan yang adil, demokratis, sejahtera, dan beradab, menjadi arah moral bagi pembangunan nasional. Namun, realisasi idealisme ini membutuhkan konsistensi, kesadaran kolektif, serta kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan kemanusiaan. Di sisi lain, dimensi fleksibilitas Pancasila menegaskan kemampuan ideologi ini untuk menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya. Fleksibilitas tersebut menjadikan Pancasila ideologi yang terbuka, dinamis, dan kontekstual, mampu merespons perubahan global

dan sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya. Dengan demikian, secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi negara tidak hanya bersifat normatif dan ideal, tetapi juga praktis, dinamis, serta berakar kuat pada realitas kehidupan bangsa Indonesia, sehingga pancasila tetap relevan sebagai panduan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi seluruh unsur bangsa untuk terus memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Melalui pendidikan, keteladanan, dan kebijakan yang berkeadilan, Pancasila akan tetap menjadi sumber inspirasi dan pedoman moral bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang berdaulat, berkeadilan sosial, serta berperadaban tinggi di tengah perubahan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N. F. (2020). Pancasila Sebagai the Living Values Dalam Pengalaman Sejarah Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Candi*, 20(1), 98.
- Aditya, F. (2024). Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila: Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4), 123–126.
- Andrias, M. Y., & Rumalean, Z. Z. (2023).

- Kristalisasi butir pancasila sebagai fondasi hukum budaya di republik Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 6872–6883.
- Arifin, S., Sulistiyono, A. H., Fauzia, R., & Cempaka, G. (2023). Pancasila Sebagai Asal Mula Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), h. 2505.
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Ramadhani, A. F., Aqila, S., Masfufah, L., & Alhasitsa, S. H. (2024). Pancasila Sebagai Ideologi Negara: Implementasi Nilai-Nilai dalam Kehidupan Nasional dan Internasional Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 1–11.
- Essla, B. citra putri, Lathif Musyaffa, D., & Dwika Putri, N. (2023). Kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 407–413.
- Gulyanto, B., & Sukmawati, N. (2024). *Adaptasi Filsafat Pancasila terhadap Ideologi Baru Tinjauan dan Strategi Memperkuat Ideologi Bangsa*. 4, 16521–16528.
- Hakim, M. H., Rifqi, Q., & Wati, K. R. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Negara. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2(5), 395–400.
- Hasan, Z., Dwi Anugrah, K., Fitriyani, A., & Lampung, U. B. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara Tantangan Dalam Menghadapi Globalisasi Dan Mempertahankan Nilai-Nilai Luhur Bangsa. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(4), 93–99.
- Hasibuan, A. S., & Sulistyono, D. (2018). Peranan Ideologi Dalam Integrasi Nasional. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan (FPP-IPDN)*, Vol. 1(No. 1), 1–10.
- Irawan, A. D., Nur Adibah, Lady, & Infans Viri Toniek, D. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia. *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 11–21. <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/>
- Lumintang, G. S., Nuraini, R. P., & Ana, S. M. (2023). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 239–246.
- Marzuki, marzuki, Luthifa Rafifah Rinaldi Putri, Salwa Mazaya Siregar, & Muhammad Rapli Harahap. (2025). Analisis Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Globalisasi. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 188–195. <https://doi.org/10.58192/populer.v4i1.2992>
- Muhamad, A., Nasoha, M., Nur Atqiya, A., Pratiwi, D. I., Putri, S. R., Naim, S. A., Pusat, D., Konstitusi, S., Islam, H., & Surakarta, U. (2024). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa: Perwujudan Nilai Budaya dan Konsensus Dalam

- Keberagaman Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3), 68–84.
- Pujiati, S., & Muhsin, I. (2020). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/2187>. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 13–22. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp13-22>
- Rarezti, S. S., Azfa, I. A., Zahra, A. P., & Supriyono, S. (2025). Peran Pendidikan Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa pada Generasi Z. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 18211–18217.
- Sakinah, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Para Generasi Muda Dalam Menghadapi Era Revolusi Industrial 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 152–167. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1432>
- Sitanggang, R. M. (2024). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Landasan Implementasi dan Relevansi di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(2), 277–286. <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archiveDOI:https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.38250>
- Slam, Z. (2024). Pengembangan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Melalui Kepala Bernomor Terstruktur Sebagai Model Pendidikan Kecakapan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 9(1), 53–64. <https://doi.org/10.22219/jch.v9i1.28880>
- Sucipto, G., & Najicha, F. ulfatun. (2024). Nilai-nilai pancasila sebagai ideologi dasar negara. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 397–403. <https://doi.org/10.36805/civics.v8i2.6099>
- Sudharmono. (1995). 31576-73700-1-Sm. In *Jurnal Filsafat* (Nomor Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, hal. 1–2).
- Wafiy, N. A., Canro, R., & Muliana, T. (2024). 38134-Article Text-125776-1-10-20241129. 7, 16671–16675.
- Zulfikar, M., Adzhany Azzahra, N., & Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta, S. (2022). Constitutional and Administrative Law Review PANCASILA DAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA. *Constitutional and Administrative Law Review*, 1(1), 1–7.